



PENGADILAN NEGERI PADANG
Jl. Rasuna Said No 81 Padang
www.pn-padang.go.id

RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG



2017

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PADANG



TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TANWIMAN SYAM, SH
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Padang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : AMIN ISMANTO, SH, MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 2 Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

AMIN ISMANTO, SH, MH
Nip. 19591114 198803 1 002

TANWIMAN SYAM, SH
Nip. 19610712 198203 1 004

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PADANG



TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YASYKUR, SE
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IA Padang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : AMIN ISMANTO, SH, MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 2 Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

AMIN ISMANTO, SH, MH
Nip. 19591114 198803 1 002

YASYKUR, SE
Nip. 19600925 198211 1001

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI PADANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa/ tunggakan perkara yang diselesaikan	
		- Perdata	100%
		- Pidana	100%
		- Tipikor	100%
		- PHI	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	
		- Perdata	83%
		- Pidana	87%
		- Tipikor	83%
		- PHI	87%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	
		- Perdata	60%
		- Pidana	90%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	
- Perdata	40%		
- Pidana	10%		
e. Persentase penurunan sisa perkara	15%		
f. Persentase media yang diselesaikan	90%		
g. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	35%		
2.	Peningkatan Aksepbilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	81%
3.	Peningkatan	a. Persentase perkara yang diajukan banding,	96%

	efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim	100%
		c. Perbandingan jumlah Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 60
		d. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	85%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan	100%
		b. Persentase putusan (amar) yang dapat diakses secara online	100%
5.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dengan eksekusi yang dijalankan	90%
6.	Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan (laporan penyerapan anggaran belanja modal)	100%
7.	Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradilan	Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional pekantoran	100%